

ISBN : 979-3566-54-X

# **DIVERSIFIKASI USAHA RUMAH TANGGA DALAM Mendukung KETAHANAN PANGAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

**Handewi P. Saliem  
Sumaryanto  
Gatoet S. Hardono  
Henny Mayrowani  
Tri Bastuti P  
Yuni Marisa  
Deri Hidayat**



**PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN  
DEPARTEMEN PERTANIAN  
2006**

## KATA PENGANTAR

Buku Diversifikasi Usaha Rumah Tangga dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia disusun dari salah satu laporan hasil penelitian Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) TA. 2005 yang format dan sistematika penulisannya sudah disesuaikan sehingga memudahkan bagi pembaca untuk memahami substansi yang terkandung dalam buku ini. Laporan tersebut merupakan laporan penelitian terbaik pertama dari 13 laporan hasil penelitian PSEKP. Penilaian dilakukan oleh tim yang terdiri dari 3 orang staf pengajar jurusan Sosek, Faperta-IPB dan seorang peneliti senior PSEKP. Sebagai apresiasi dan untuk menyebarkanluaskannya kepada pihak pengguna, maka PSEKP pada TA. 2006 menerbitkannya dalam bentuk buku ini. Saya menyampaikan selamat untuk peneliti dan semoga lebih giat lagi meningkatkan prestasinya.

Di Indonesia, peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama nasional. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan yang ditetapkan dalam kerangka pembangunan nasional berimplikasi bahwa pengkajian ketahanan pangan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan menjadi penting. Ketersediaan pangan di tingkat nasional yang cukup tidak menjamin adanya ketahanan pangan di tingkat wilayah dan rumah tangga.

Ketahanan pangan dan masalah kemiskinan di suatu wilayah mempunyai sifat multidimensional yang ditentukan oleh berbagai faktor ekologis, sosial ekonomi dan budaya serta melibatkan berbagai sektor. Mengacu pada karakteristik yang beragam tersebut, maka pemecahan masalah ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan wilayah harus bersifat holistik. Diversifikasi usaha rumah tangga diduga merupakan salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.

PSEKP menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Editor dan semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat dipakai sebagai salah satu rujukan bagi pengguna dalam memantapkan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan kedepan.

Bogor, September 2006  
Kepala Pusat,

Dr. Tahlim Sudaryanto  
NIP. 080 035 289

## KATA PENGANTAR DEWAN EDITOR

Kami menyambut baik inisiatif Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) memberikan apresiasi menerbitkan judul penelitian terbaiknya dalam bentuk buku ini. Langkah ini sangat baik karena disamping memacu peneliti untuk meningkatkan kualitas hasil penelitiannya, juga sekaligus sebagai salah satu untuk mempercepat penyampaian hasil penelitian yang telah dilakukan PSEKP kepada pengguna.

Sesuai Surat Keputusan Kelapa Badan Litbang Pertanian No. 27/Kpts/OT.160/J/2/2006, Dewan Editor dibentuk untuk membantu menerbitkan buku ini. Kontribusi Dewan Editor dalam penerbitan buku ini hanya sebatas dalam penyusunan sistematika penampilan dan bahasa sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal substansi, Dewan Editor hanya memberi saran kepada penulis buku yang tidak mesti mereka terima dan laksanakan. Semua apresiasi yang mungkin patut diberikan dari buku ini sepenuhnya menjadi hak para penulisnya.

Dewan Editor mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang telah memberikan kepercayaan untuk mengedit buku ini. Dewan Editor sangat yakin tampilan akhir buku ini masih jauh dari sempurna, namun inilah hasil akhir optimal yang dapat dilakukan. Kepada para penulis Dewan Editor menyampaikan mohon maaf bila telah merepotkan atau mungkin terlalu lancang dalam melakukan editan atas naskah awal buku ini. Semua itu dilakukan dengan niat baik yang mungkin berguna bagi para penulis juga.

Demikian, semoga buku ini dapat memberi tambahan informasi dan pengetahuan bagi para pengguna, khususnya bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi dan langkah operasional pembangunan pertanian ke depan.

Dewan Editor

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
KATA PENGANTAR DEWAN EDITOR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL LAMPIRAN.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. PENGARUH PERUBAHAN LINGSTRAT TERHADAP STRUKTUR PEREKONOMIAN WILAYAH.....	4
2.1. Demografi dan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi Nasional .....	4
2.1.1. Perkembangan Penduduk dan Angkatan Kerja .	4
2.1.2. Perkembangan Distribusi dan Kesempatan Kerja.....	5
2.1.3. Perkembangan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi.	8
2.2. Demografi dan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi di Provinsi .....	11
2.2.1. Perkembangan Penduduk dan Angkatan Kerja .	11
2.2.2. Perkembangan Sektor Perekonomian .....	12
2.2.3. Perkembangan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi.	18
2.3. Demografi Pertanian dan Industri Pedesaan .....	21
2.3.1. Penduduk dan Mata Pencaharian.....	22
2.3.2. Kinerja Pertanian.....	26
2.3.3. Sistem dan Perkembangan Tingkat Upah.....	29
2.3.4. Kinerja Industri Pedesaan .....	32
III. DIVERSIFIKASI USAHA DAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA.....	41
3.1. Dinamika Struktur Pendapatan Rumah Tangga .....	41
3.2. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga.....	51
3.3. Diversifikasi Usaha Rumah Tangga.....	21
IV. DIVERSIFIKASI USAHA, KETAHANAN PANGAN, DAN KEMISKINAN .....	57
4.1. Indikasi Kemiskinan Rumah Tangga.....	57
4.2. Kinerja Ketahanan Pangan Rumah Tangga.....	61

4.3. Faktor Determinan Diversifikasi Usaha Rumah Tangga	64
4.4. Peluang Tidak Miskin dan Ketergantungan Terhadap Sektor Pertanian .....	69
V. DIVERSIFIKASI USAHA PENDAPATAN DAN KETAHANAN PANGAN DI ENAM DESA CONTOH.....	72
5.1. Karakteristik Rumah Tangga .....	72
5.2. Struktur Pendapatan Rumah Tangga.....	75
5.3. Kinerja Pertanian dan Dinamika Pola Tanam .....	80
5.4. Faktor yang Mempengaruhi Diversifikasi Usaha Pertanian.....	87
5.5. Ragam Pendapatan dan Dinamika Diversifikasi Usaha.	89
5.6. Pola Pengeluaran Pangan.....	94
5.7. Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Desa-desa Contoh .....	102
VI. PROSPEK PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI DIVERSIFIKASI USAHA .....	106
VII. RANGKUMAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN.....	111
7.1. Rangkuman.....	111
7.2. Implikasi Kebijakan.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN METODE PENELITIAN.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja, 1961-2000 .	4
2. Perkembangan Distribusi dan Kesempatan Kerja Menurut Sektor Ekonomi, 1980-2000 .....	5
8. Perkembangan Distribusi Nilai Tambah Bruto Menurut Sektor Perekonomian, 1980-2000.....	6
9. Perkembangan Distribusi Total Gaji dan Upah Menurut Sektor Perekonomian, 1980-2000.....	7
5. Perkembangan Tingkat Gaji dan Upah Sektoral per Pekerja, 1980-2000.....	8
6. Perkembangan Diversitas Alokasi Output Pada Permintaan Antara (intermediate input) Tahun 1980, 1990 dan 2000....	9
7. Proporsi Alokasi Output dari Sektor Pertanian .....	10
8. Persentase Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja 1995 - 2003 .....	11
9. Jumlah Rumah Tangga Pertanian di Provinsi Penelitian Menurut Sumber Penghasilan Utama, Tahun 2003.....	12
10. Jumlah Rumah Tangga Pertanian di Kabupaten Contoh, 2003.....	12
11. Struktur PDRB Jawa Timur Tahun 2000 dan 2001 Atas Harga Konstan 1993 .....	13
12. Struktur PDRB Sulawesi Selatan 2000 dan 2001 Atas Harga Konstan 1993 .....	14
13. Struktur PDRB Nusa Tenggara Barat 2000 dan 2001 Atas Harga Konstan 1993 .....	14
14. PDRB Kabupaten Kediri dan Malang Atas Harga Konstan 1993.....	15
15. PDRB Kabupaten Wajo dan Kabupaten Pinrang Atas Harga Konstan 1993 .....	16

16.	PDRB Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur Atas Harga Konstan 1993 .....	17
17.	Rumah Tangga Pertanian di Tiga Provinsi Contoh Menurut Sumber Penghasilan Utama, 2003.....	18
18.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan, 2003.....	21
19.	Dinamika Kependudukan di Lokasi Penelitian Menurut Agroekosistem, Tahun 1999 dan 2003 .....	22
20.	Keragaan Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan Berdasarkan Agroekosistem di Lokasi Penelitian, 2004.....	24
21.	Dinamika Distribusi Matapencaharian Utama Penduduk Menurut Agroekosistem di Lokasi Penelitian, 1999 dan 2003.....	25
22.	Kinerja Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Agroekosistem Sawah, 2003.....	27
23.	Perkembangan Sistem dan Nilai Upah Pertanian, di Desa Contoh Menurut Agroekosistem.....	30
24.	Kinerja Industri Pedesaan Menurut Skala Berdasarkan Tenaga Kerja di Desa Contoh, Tahun 2003.....	33
25.	Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia, 1996-2002 .....	42
26.	Perubahan Struktur Pendapatan di Daerah Kota dan Desa Provinsi Contoh, 1996-2002 .....	43
27.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Mata-pencaharian Utama KK di Indonesia, 1996-2002 .....	45
28.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Mata-pencaharian Utama KK di Jawa Timur, 1996-2002.....	46
29.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Mata-pencaharian Utama KK di Nusa Tenggara Barat, 1996-2002 .....	47
30.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Mata-pencaharian Utama KK di Sulawesi Selatan, 1996-2002....	48

31.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Indonesia, 1996-2002 .....	50
32.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Jawa Timur, 1996-2002 .....	50
33.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Nusa Tenggara Barat, 1996-2002 .....	51
34.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Sulawesi Selatan, 1996-2002 .....	51
35.	Indeks Gini Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Daerah, 1996 dan 2002.....	52
36.	Indeks Gini Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Pekerjaan Utama KK, 1996 dan 2002.....	53
37.	Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	55
38.	Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK.....	56
39.	Pola Pengeluaran Rumah Tangga (%) di Indonesia Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002....	58
40.	Pola Pengeluaran Rumah Tangga (%) di Jawa Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002 .....	59
41.	Pola Pengeluaran Rumah Tangga (%) di Nusa Tenggara Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	60
42.	Pola Pengeluaran Rumah Tangga (%) di Sulawesi Selatan Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002 .....	60
43.	Rataan Konsumsi Energi (Kkal) Menurut Wilayah, Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK di Indonesia, 1996-2002 .....	61
44.	Konsumsi Energi (Kkal) Menurut Wilayah, Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002 .....	62



45.	Rataan Konsumsi Protein (g/kapita/hari) Menurut Wilayah, Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK di Indonesia, 1996-2002 .....	63
46.	Rataan Konsumsi Protein (g/kapita/hari) Menurut Wilayah, Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK di Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Selatan, 1996-2002 .....	64
47.	Faktor yang Mempengaruhi Peluang Diversifikasi Usaha Rumah Tangga di Indonesia, 2002.....	65
48.	Faktor yang Mempengaruhi Peluang Diversifikasi Usaha Rumah Tangga di Nusa Tenggara Barat, 2002.....	67
49.	Determinan Faktor Peluang Rumah tangga Untuk Keluar dari Kemiskinan di Indonesia, 2002 .....	70
50.	Determinan Faktor Peluang Rumah Tangga Untuk Keluar dari Kemiskinan di Jawa Timur, 2002 .....	71
51.	Determinan Faktor Peluang Rumah Tangga Untuk Keluar dari Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat, 2002 .....	71
52.	Determinan Faktor Peluang Rumah Tangga Untuk Keluar dari Kemiskinan di Sulawesi Selatan, 2002.....	71
53.	Karakteristik Rumah Tangga Contoh, di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan, 2005.....	72
54.	Rataan Pemilikan dan Penguasaan Lahan di Lokasi Contoh Menurut Agroekosistem, 2005.....	73
55.	Keragaan Pemilikan Aset Ternak yang Diusahakan Responden Menurut Lokasi, 2005 .....	74
56.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sektor di Lokasi Penelitian, 2005.....	75
57.	Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Contoh, Nusa Tenggara Barat (Kota + Desa), 1996-2002 .....	77
58.	Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga (%) di Kabupaten Contoh, Sulawesi Selatan (Kota + Desa), 1996-2002 .....	78

59.	Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga (%) di Kabupaten Contoh, Jawa Timur (Kota + Desa), 1996-2002 .....	79
60.	Keragaan Pola Tanam di Desa Pringgabaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (Lahan Kering Berbasis Tanaman Hortikultura) dan Perubahannya Selama Sepuluh Tahun Terakhir.....	81
61.	Keragaan Pola Tanam di Desa Sekotong Tengah, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (Lahan Kering Berbasis Tanaman Pangan) dan Perubahannya Selama Sepuluh Tahun Terakhir.....	83
62.	Keragaan Pola Tanam di Desa Pincara, Pinrang, Sulawesi Selatan (Lahan Kering Berbasis Tanaman Perkebunan Kakao) dan Perubahannya Selama Sepuluh Tahun Terakhir.....	84
63.	Keragaan Pola Tanam di Desa Dua Limpoe, Wajo, Sulawesi Selatan (Lahan Sawah Berbasis Tanaman Pangan) dan Perubahannya Sepuluh Tahun Terakhir .....	85
64.	Keragaan Pola Tanam di Desa Pujon, Malang, Jawa Timur (Peternakan Sapi Perah) dan Perubahan Selama Sepuluh Tahun Terakhir.....	86
65.	Keragaan Pola Tanam di Desa Pare, Kediri, Jawa Timur (Lahan Sawah berbasis Tanaman Pangan) dan Perubahan Selama Sepuluh Tahun Terakhir .....	87
66.	Alasan Petani Melakukan Diversifikasi Usaha Pertanian (%)	88
67.	Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Contoh di Nusa Tenggara Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002)...	90
68.	Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Contoh di Sulawesi Selatan Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002)...	91
69.	Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Contoh di Jawa Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002) .....	92
70.	Keragaan Diversifikasi Usaha Rumah Tangga dan Alasan Responden, Tahun 2005.....	93

71. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Lombok Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002) .....	94
72. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Lombok Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002) .....	96
73. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Pinrang Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002) .....	98
74. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Wajo Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002) .....	99
75. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Malang Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002) .....	100
76. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Kediri Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002) .....	101

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Perubahan Indeks Diversitas Kesempatan Kerja, Gaji dan Upah serta Nilai Tambah Bruto dalam Sistem Perekonomian Nasional.....	10
2. Struktur Rumah tangga Pertanian Menurut Kelompok Pendapatan.....	20
3. Struktur Rumah tangga Pertanian Menurut Kelompok Pendapatan di Kabupaten Contoh .....	21

## DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel Lampiran	Halaman
1. Sebaran Lokasi Penelitian, Agroekosistem (AES), dan Jumlah Responden .....	138
2. Daftar Nama Desa-desa Penelitian Menurut Provinsi, Kabupaten dan Tipe Agroekosistem, Tahun 2005.....	138
3. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data Menurut Tujuan Analisis, 2005.....	145
4. Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Kota Provinsi Contoh, 1996-2000.....	146
5. Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Desa Provinsi Contoh, 1996-2000.....	146
6. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Contoh, 2002 .....	147
7. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Kota di Indonesia, 1996-2002 .....	158
8. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Desa di Indonesia, 1996-2002 .....	158
9. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Kota di Jawa Timur, 1996-2002.....	149
10. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Desa di Jawa Timur, 1996-2002.....	149
11. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Kota di NTB, 1996-2002 .....	150
12. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Desa di NTB, 1996-2002 .....	150
13. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Kota di Sulawesi Selatan, 1996-2002.....	151

---

14.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Desa di Sulawesi Selatan, 1996-2002.....	151
15.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Kota di Indonesia, 1996-2002.....	152
16.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Desa di Indonesia, 1996-2002 .....	152
17.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Kota di Jawa Timur, 1996-2000 .....	152
18.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Desa di Jawa Timur, 1996-2000.....	153
19.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Kota di Nusa Tenggara Barat, 1996-2002 .....	153
20.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Desa di Nusa Tenggara Barat, 1996-2002 .....	153
21.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Kota di Sulawesi Selatan, 1996-2002 .....	154
22.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Desa di Sulawesi Selatan, 1996-2002 .....	154
23.	Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002 .....	155
24.	Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Kota di Nusa Tenggara Barat, 1996-2002.....	156
25.	Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Desa di Nusa Tenggara Barat, 1996-2002 .....	156
26.	Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Kota di Sulawesi Selatan, 1996-2002 .....	157
27.	Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Desa di Sulawesi Selatan, 1996-2002.....	157

28.	Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga Daerah Kota di Jawa Timur, 1996-2002 .....	158
29.	Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga Daerah Desa di Jawa Timur, 1996-2002.....	158
30.	Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Contoh di Nusa Tenggara Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama, 1996-2002 .....	159
31.	Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Contoh di Nusa Tenggara Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama, 1996-2002 .....	159
32.	Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Contoh di Sulawesi Selatan Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama, 1996-2002 .....	160
33.	Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Contoh di Sulawesi Selatan Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama, 1996-2002 .....	160
34.	Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Contoh di Jawa Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama, 1996-2002 .....	161
35.	Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Contoh di Jawa Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama, 1996-2002 .....	161
36.	Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Lombok Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	162
37.	Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Lombok Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	162
38.	Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Lombok Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	163

39.	Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Lombok Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	163
40.	Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Pinrang Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	164
41.	Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Pinrang Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	164
42.	Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Wajo Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	165
43.	Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Wajo Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	165
44.	Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Malang Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	166
45.	Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Malang Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	166
46.	Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Kediri Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	167
47.	Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Kediri Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	167



## I. PENDAHULUAN

Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama nasional sejak satu dasawarsa yang lalu. Hal ini terkait dengan komitmen negara sebagai salah satu penanda tangan kesepakatan dalam MDGs (Millennium Development Goals) yang sejalan dengan Deklarasi Roma dalam World Food Summit tahun 1996 yang menegaskan bahwa dari 800 juta penduduk dunia yang kelaparan separuhnya diharapkan dapat dikurangi pada tahun 2015. Terkait dengan masalah itu, isu penanggulangan kemiskinan yang telah diluncurkan sejak awal 1990-an juga masih menjadi agenda penting dalam pembangunan nasional.

Kebijakan peningkatan ketahanan pangan yang ditetapkan dalam kerangka pembangunan nasional tersebut berimplikasi bahwa pengkajian ketahanan pangan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan menjadi penting (Soetrisno, 1995). Ketersediaan pangan yang cukup di tingkat nasional tidak menjamin ketahanan pangan di tingkat wilayah dan tingkat rumah tangga/individu. Studi Saliem, dkk. (2001) menunjukkan walaupun ketahanan pangan di tingkat regional (provinsi) tergolong terjamin namun di provinsi yang bersangkutan masih ditemukan rumah tangga yang tergolong rawan pangan dengan proporsi tinggi. Di Provinsi D.I. Yogyakarta, Lampung, Kalbar dan Sulut proporsi rumah tangga rawan pangan tahun 1999 berkisar antara 21-31% dari total rumah tangga di keempat provinsi tersebut.

Ketahanan pangan dan masalah kemiskinan di suatu wilayah mempunyai sifat multidimensional, yang ditentukan oleh berbagai faktor ekologis, sosial ekonomi dan budaya serta melibatkan berbagai sektor. Mengacu pada karakteristik yang beragam tersebut maka pemecahan masalah ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan wilayah harus bersifat holistik. Diversifikasi usaha rumah tangga merupakan salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam sistem perekonomian global, perubahan lingkungan strategis (lingstrat) internasional dan domestik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian kinerja pembangunan suatu negara. Lingstrat internasional, utamanya yang terkait dengan reformasi perdagangan dunia yang mengarah pada sistem perdagangan bebas dan perubahan makroekonomi akan mempengaruhi struktur perekonomian suatu negara; khususnya negara yang turut meratifikasi perubahan tersebut seperti Indonesia. Perubahan struktur perekonomian negara selanjutnya akan mempengaruhi struktur perekonomian di tingkat wilayah (provinsi, kabupaten sampai desa) yang akan berpengaruh terhadap perubahan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di tingkat rumah tangga. Dalam hal demikian secara tidak langsung perubahan lingstrat internasional akan berpengaruh terhadap performa keanekaragaman sumber pendapatan (diversifikasi usaha) rumah tangga

sebagai konsekuensi adanya perubahan struktur perekonomian di tingkat wilayah. Bagaimana pengaruh diversifikasi usaha rumah tangga terhadap kinerja ketahanan pangan dan penurunan kemiskinan merupakan aspek yang menarik untuk dikaji.

Lingstrat domestik yang diduga memiliki pengaruh kuat terhadap diversifikasi usaha rumah tangga, ketahanan pangan, dan kemiskinan adalah adanya reformasi sektor pertanian dan pedesaan. Dalam hal ini perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi melalui otonomi daerah memiliki konsekuensi pada perubahan paradigma pembangunan termasuk pembangunan pertanian. Beberapa perubahan di sektor pertanian seperti promosi diversifikasi tanaman, pengembangan komoditas yang bernilai tinggi, dan pengembangan agroindustri akan berpe-ngaruh terhadap struktur perekonomian wilayah, dan pada gilirannya hal tersebut akan berdampak pada perubahan kinerja diversifikasi usaha di tingkat rumah tangga, ketahanan pangan, dan kemiskinan.

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk merupakan sasaran akhir dari pembangunan nasional dihadapkan kepada berbagai kendala, baik teknis, alamiah, sumber daya, maupun sosial-budaya. Salah satu kendala utama dalam peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan yang sebagian besar tergantung pada sektor pertanian adalah kecilnya tingkat penguasaan lahan pertanian. Mengingat kecilnya kemungkinan untuk melakukan perluasan lahan pertanian, diversifikasi usaha merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Diversifikasi usaha rumah tangga adalah suatu proses semakin beragam dan banyaknya jenis usaha rumah tangga yang menjadi sumber pendapatan. Tingkat keragaman diversifikasi usaha yang dapat dijadikan sumber pendapatan rumah tangga tidak terlepas dari keragaman dan struktur perekonomian di tingkat wilayah (provinsi, kabupaten, kecamatan/desa.). Melalui diversifikasi usaha, pendapatan rumah tangga diharapkan meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan, akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan meningkat sehingga tingkat ketahanan pangan rumah tangga meningkat, dan tingkat kemiskinan diharapkan dapat berkurang.

Berpijak dari kerangka pikir seperti itu maka studi tentang analisis diversifikasi usaha rumah tangga dalam mendukung ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan penting dilakukan. Untuk itu perlu kajian tentang perubahan keragaman atau struktur perekonomian di tingkat wilayah; struktur, besaran, distribusi, dan keragaman sumber pendapatan di tingkat rumah tangga dan kaitannya dengan ketahanan pangan, dan kemiskinan. Hasil studi ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan pembangunan di sektor pertanian dan pedesaan.

Secara umum penelitian bertujuan untuk menganalisis diversifikasi usaha di tingkat wilayah dan rumah tangga dikaitkan dengan upaya pemantapan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan di pedesaan. Secara rinci penelitian bertujuan untuk:

1. Melakukan analisis dan review tentang perubahan diversifikasi usaha dan struktur perekonomian di tingkat wilayah (nasional, provinsi, kabupaten, desa).
2. Menganalisis struktur, distribusi, dan ragam sumber pendapatan (diversifikasi usaha) di tingkat rumah tangga
3. Menganalisis keterkaitan antara diversifikasi usaha rumah tangga, ketahanan pangan, dan tingkat pendapatan/kemiskinan
4. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat diversifikasi pertanian dan usaha rumah tangga
5. Merumuskan saran kebijakan pengembangan diversifikasi usaha rumah tangga di pedesaan dikaitkan dengan upaya pemantapan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.

## VII. RANGKUMAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

### 7.1. Rangkuman

1. Sektor pertanian masih merupakan penyedia lapangan kerja terbesar dengan ketersediaan yang paling dominan pada subsektor padi, subsektor tanaman sayuran dan buah-buahan. Namun sejak 1991 kemampuan sektor pertanian dalam penyediaan lapangan kerja semakin menurun. Jika pada tahun 1980 proporsi penyerapan tenaga kerja pada sektor ini sebesar 54%, pada tahun 2002 angka itu turun menjadi 42%. Sejalan dengan itu, kontribusi sektor pertanian dalam penciptaan nilai tambah bruto juga menurun sehingga berdampak pada produktivitas tenaga kerja yang semakin rendah di sektor pertanian.
2. Kontribusi sektor agroindustri, yang merupakan industri hilir dari sektor pertanian, dalam menyerap lapangan kerja relatif rendah (kurang dari 5%). Di luar sektor pertanian, sektor ekonomi yang paling menonjol dalam penyerapan tenaga kerja adalah sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa.
3. Dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, kompensasi tenaga kerja di sektor pertanian adalah yang terkecil. Oleh karena peningkatannya juga lambat maka secara relatif bagian terbesar dari penduduk miskin Indonesia akan berasal dari rumah tangga yang menggantungkan hidupnya dari sektor tersebut.
4. Perkembangan diversifikasi kegiatan ekonomi pada sektor pertanian lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor non-pertanian karena secara umum kaitan ke depan dan ke belakang sektor pertanian lebih rendah daripada sektor nonpertanian. Secara umum diversifikasi kegiatan ekonomi pada periode 1980-1990 berkembang lebih cepat daripada periode 1990-2000.
5. Di level provinsi, sekitar 70-80 % dari rumah tangga pertanian di Provinsi Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan mengandalkan penghasilan dari usahatani tanaman pangan. Adapun sisanya, memiliki pendapatan utama dari kegiatan ekonomi di sektor non-pertanian. Terkait hal ini, fenomena yang terjadi di tingkat kabupaten tidak banyak berbeda dari tingkat provinsi.
6. Dalam konteks perubahan struktur perekonomian, fenomena yang terjadi di tingkat kabupaten menunjukkan pola perubahan yang lebih beragam. Beberapa temuan yang menarik adalah: (a) pada periode 2000-2001 tidak semua kabupaten mengalami peningkatan PDRB riil. Dari enam kabupaten contoh, lima diantaranya mengalami peningkatan PDRB riil (atas harga konstan 1993) yaitu: Kediri (Jawa Timur), Wajo, Pinrang (Sulawesi Selatan), Lombok Barat, Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat). Sedangkan Kabupaten Malang (Jawa Timur) mengalami penurunan PDRB riil.

7. Analisis terhadap perubahan lingkungan strategis level kabupaten juga menghasilkan kesimpulan bahwa pada saat terjadi kontraksi ekonomi (kasus Kabupaten Malang), sektor pertanian cenderung lebih tahan. Oleh karena itu kontraksi yang terjadi lebih sedikit daripada sektor perekonomian lainnya sehingga secara relatif pangsa sektor pertanian dalam penciptaan PDRB justru meningkat.
8. Dari penelitian ini juga diperoleh kesimpulan bahwa pada level wilayah yang lebih kecil (kabupaten), sektor pertanian juga mampu berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Kasus di Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa peningkatan pangsa sektor pertanian dalam penciptaan PDRB dan peningkatan PDRB riil dapat terjadi secara bersamaan.
9. Berdasarkan analisis data tingkat provinsi dan kabupaten dapat disebutkan bahwa kegiatan ekonomi di wilayah yang sektor non-pertaniannya lebih berkembang, cenderung lebih bervariasi. Namun demikian perkembangan diversifikasi kegiatan ekonomi di sektor pertanian belum berhasil mengangkat taraf kehidupan petani secara nyata. Sekitar separuh dari rumah tangga pertanian, berpendapatan di bawah 5 juta rupiah per tahun. Sekitar 32% berpendapatan antara 5 – 9.9 juta, dan sisanya berpendapatan 10 juta rupiah atau lebih per tahun. Secara umum, distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan relatif lebih merata daripada di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu pada rumah tangga pertanian di masing-masing kabupaten contoh rata-rata tingkat pendapatan yang terendah adalah di Lombok Timur, sedangkan yang tertinggi di Wajo.
10. Gambaran tentang peranan sektor pertanian dalam ekonomi rumah tangga petani di level provinsi menunjukkan bahwa di Jawa Timur kontribusi pendapatan rumah tangga dari pertanian hanya sekitar 48%. Di Nusa Tenggara Barat, hanya sekitar separuh, sedangkan di Sulawesi Selatan relatif tinggi yaitu sekitar 63%.
11. Data empiris menunjukkan bahwa tingkat diversitas usaha rumah tangga bervariasi menurut wilayah (desa-kota), kelompok pendapatan, sumber pendapatan utama KK, maupun agroekosistem. Tingkat diversitas usaha rumah tangga di desa relatif lebih tinggi daripada di kota untuk semua kelompok pendapatan. Searah dengan hal ini, secara relatif tingkat diversifikasi usaha rumah tangga pertanian lebih tinggi dibanding rumah tangga non-pertanian. Terdapat kecenderungan menurunnya tingkat diversifikasi usaha rumah tangga dengan makin tingginya tingkat pendapatan.
12. Tingkat diversifikasi usaha rumah tangga di agroekosistem lahan kering dengan basis usaha komoditas perkebunan (kakao) dan peternakan (sapi perah) relatif lebih rendah dibanding rumah tangga di agroekosistem lahan sawah maupun lahan kering dengan basis komoditi hortikultura dan tanaman pangan. Hal ini terkait dengan relatif lebih tingginya rataan pendapatan rumah tangga di agro-

- ekosistem lahan kering dengan basis komoditas kakao dan peternakan sapi perah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingginya diversifikasi usaha rumah tangga pertanian (di agroekosistem lahan sawah dan lahan kering dengan basis komoditas tanaman pangan dan hortikultura) lebih didorong untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga karena terbatasnya pendapatan dari pertanian.
13. Secara umum keberadaan sektor non-pertanian (agroindustri) di desa-desa penelitian relatif terbatas. Keterbatasan kepemilikan modal dan sulitnya pemasaran merupakan kendala utama pengembangan sektor tersebut. Searah dengan temuan di tingkat makro, penyerapan tenaga kerja sektor tersebut di pedesaan relatif rendah. Beberapa kegiatan industri yang ada di daerah penelitian umumnya industri kecil skala rumah tangga seperti kerajinan tenun sutera, pengolahan krupuk kulit, dan pengolahan tahu, atau anyaman bambu. Dengan industri seperti ini, omset usaha relatif kecil dan umumnya hanya menggunakan tenaga kerja keluarga.
  14. Kasus penelitian di tingkat kabupaten menunjukkan bahwa rata-rata rumah tangga contoh memiliki lebih dari dua jenis sumber pendapatan dan bervariasi menurut agroekosistem. Alasan melakukan diversifikasi usaha juga bervariasi menurut agroekosistem. Di desa contoh Kabupaten Lombok Timur (lahan kering basis tanaman hortikultura) mayoritas responden menyatakan mereka melakukan diversifikasi karena pendapatan di sektor pertanian terbatas. Karena itu, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, KK atau anggota rumah tangga berusaha di luar sektor pertanian. Di Kabupaten Wajo (agroekosistem lahan sawah) alasan diversifikasi usaha disebabkan oleh adanya surplus tenaga kerja sedangkan bagi anggota rumah tangga usia muda dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih baik diversifikasi usaha karena sesuai minat.
  15. Analisis data SUSENAS menunjukkan, dalam kurun 1996-2002 pendapatan rumah tangga meningkat dengan besaran bervariasi antar wilayah dan provinsi. Peningkatan pendapatan di kota dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan di desa. Dengan nilai nominal dan perubahan pendapatan yang rendah pada rumah tangga di desa maka indikasi kesenjangan antara desa dan kota menjadi semakin kuat.
  16. Secara agregat, dalam struktur pendapatan rumah tangga kontribusi pendapatan dari upah dan gaji meningkat 9,4% pada periode 1996-2002 demikian pula kontribusi pendapatan dari sumber lain meningkat sekitar 3,8%. Di sisi lain, pangsa pendapatan usaha pertanian, nonpertanian dan pendapatan bukan upah dan gaji menurun, masing-masing sebesar 6,5%, 1,3%, dan 5,7% dalam periode yang sama.
  17. Struktur pendapatan rumah tangga masih dicirikan oleh dominannya pendapatan dari upah dan gaji, khususnya pada rumah tangga di kota. Di desa, kontribusi pendapatan terbesar berasal dari usaha

- pertanian, khususnya yang bersumber dari pengusaha tanaman (pangan dan nonpangan), yang mencapai lebih dari 30%. Pada periode 1996-2002, kontribusi pendapatan usaha pertanian menurun dari 39,1% menjadi 34,2%. Di seluruh wilayah, tingkat pendapatan rumah tangga di mana pekerjaan utama kepala keluarganya adalah petani, lebih rendah dibandingkan rumah tangga yang kepala keluarganya bekerja pada sektor lain. Kontribusi pendapatan dari usaha pertanian cenderung semakin rendah dengan meningkatnya kelas pendapatan rumah tangga.
18. Pada konteks distribusi, ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan cenderung meningkat pada periode 1996-2002. Namun, meskipun secara agregat ketidakmerataan tergolong berat, khususnya di kota, di tingkat regional ketidakmerataan masih tergolong ringan. Perubahan ketidakmerataan distribusi pendapatan selama kurun waktu di atas cenderung tinggi pada rumah tangga industri dan pertanian.
  19. Analisis indeks entropy menunjukkan, rumah tangga di desa memiliki diversitas usaha lebih tinggi dibandingkan rumah tangga kota. Bila dibandingkan antar sektor, baik di kota maupun di desa, tingkat diversitas yang tertinggi adalah pada rumah tangga pertanian. Berbeda dari kondisi tahun 1996, diversitas usaha rumah tangga pada tahun 2002 cenderung turun dengan semakin tingginya kelas pendapatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketimpangan yang makin meningkat membuat kelompok rumah tangga berpendapatan rendah harus bekerja lebih variatif agar dapat memenuhi kebutuhannya. Mengandalkan usaha kepada satu sumber pendapatan saja sudah tidak layak dilakukan.
  20. Berdasarkan pola pengeluaran pangan terdapat indikasi bahwa jumlah rumah tangga miskin meningkat selama periode 1996-2002. Namun potensi peningkatan rumah tangga miskin yang lebih tinggi terdapat pada kelompok rumah tangga pertanian. Dari perspektif ketahanan pangan, dengan proporsi pengeluaran pangan yang relatif besar, rumah tangga pertanian memiliki kinerja kecukupan energi dan protein yang lebih baik dari sisi outcome dibandingkan kelompok rumah tangga lain. Secara umum, pola konsumsi rumah tangga di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kriteria gizi seimbang karena meskipun konsumsi protein rumah tangga cenderung telah melebihi angka kecukupannya, tetapi sebagian mereka masih ada yang mengalami kekurangan energi.
  21. Kinerja ketahanan pangan rumah tangga meningkat seiring dengan peningkatan kelas pendapatan rumah tangga. Hal itu terjadi sebagai refleksi meningkatnya daya akses rumah tangga terhadap pangan. Oleh sebab itu, diversifikasi usaha yang dilakukan oleh mereka yang berpendapatan rendah untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan sesungguhnya merupakan bagian dari strategi coping yang dilakukan rumah tangga. Kesimpulan tersebut dipertegas dengan perolehan

- tanda dan tingkat signifikansi peubah dummy status utama KK-nya sebagai petani dan peubah pendapatan total rumah tangga dalam analisis fungsi Logistik.
22. Hasil pengolahan fungsi Logistik tersebut juga menunjukkan, peluang diversifikasi usaha dipengaruhi oleh peubah tingkat pendidikan dan umur KK serta ukuran rumah tangga. Meskipun di tingkat nasional peubah-peubah tersebut berpengaruh sama pada wilayah kota dan desa tetapi di tingkat regional tanda dan signifikansi peubah bervariasi.
  23. Terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, hasil analisis fungsi Logistik mengindikasikan, kemiskinan di Indonesia berasosiasi erat dengan kinerja sektor pertanian. Secara nasional, peluang rumah tangga untuk tidak miskin menjadi sulit dicapai ketika ketergantungan mereka terhadap aktivitas dan pendapatan dari sektor pertanian semakin besar, terlebih di pedesaan. Secara makro, kondisi demikian dapat dimaklumi karena sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dalam struktur perekonomian nasional. Tetapi di sisi lain, kontribusi sektor ini terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung menurun sehingga produktivitas pertanian menjadi sangat rendah dibandingkan sektor lain seperti industri, perdagangan maupun jasa yang terus berkembang.
  24. Di tingkat regional, kecenderungan citra miskin pada rumah tangga yang bergantung pada sektor pertanian terlihat di wilayah pedesaan, khususnya di Jawa Timur. Untuk di wilayah pedesaan Sulawesi Selatan, meski peubah pangsa pendapatan pertanian bertanda positif tetapi secara statistik tidak signifikan sehingga tidak mempengaruhi pengambilan kesimpulan. Pengamatan empiris di provinsi tersebut memang menunjukkan bahwa skala usahatani rumah tangga di Sulawesi Selatan relatif lebih luas dibandingkan di dua provinsi contoh lain. Disamping itu, situasi pasar komoditas yang kondusif membuat harga-harga komoditas relatif kompetitif sehingga secara ekonomi berpeluang memberikan dominasi pada besaran (magnitude) maupun kontribusi struktur pendapatan rumah tangga di provinsi tersebut. Jumlah anggota rumah tangga yang makin besar akan mempersulit upaya rumah tangga keluar dari perangkap kemiskinan karena beban tanggungan rumah tangga secara ekonomi makin berat. Hal ini berlaku untuk seluruh wilayah (nasional maupun regional), baik di desa maupun kota.

## 7.2. Implikasi Kebijakan

25. Peran sektor pertanian masih strategis dalam penciptaan nilai tambah bruto dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu pembangunan nasional, khususnya di pedesaan, seharusnya lebih memprioritaskan penanganan sektor tersebut agar dampak pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga dapat lebih nyata. Lebih dari



itu, karena proporsi rumah tangga berpendapatan rendah relatif besar berada pada sektor pertanian, khususnya di pedesaan, maka strategi pembangunan ke depan seharusnya lebih mengakomodasi upaya mengintegrasikan permasalahan pedesaan dan pertanian untuk menekan laju pertumbuhan penduduk miskin. Dalam kaitan ini, model pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan semata, namun lebih mengedepankan adanya perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di pedesaan merupakan strategi yang perlu ditempuh.

26. Guna mengurangi beban sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja dan untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rumah tangga di pedesaan maka upaya pengembangan investasi yang mendorong penciptaan nilai tambah produk berbasis pertanian dan memperluas lapangan kerja menjadi kebutuhan mendesak, khususnya di pedesaan. Kebijakan tersebut akan membuka peluang kesempatan rumah tangga di pedesaan melakukan diversifikasi usaha untuk meningkatkan pendapatan dan akses terhadap pangan dan menurunkan kemiskinan di pedesaan.
27. Dengan telah diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah, peran pemerintah daerah (Pemda kabupaten) sangat strategis dalam operasionalisasi kebijakan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha di pedesaan. Fasilitasi yang dapat diperankan oleh Pemda dalam kaitan penciptaan kesempatan kerja di pedesaan adalah mendorong pengembangan agroindustri di pedesaan berbasis potensi wilayah setempat. Hal ini perlu didukung oleh (1) penyediaan sarana dan prasarana jalan, pelabuhan, pasar, sarana transportasi yang diharapkan dapat menurunkan biaya produksi dan pemasaran produk, (2) kemudahan perizinan dan penghapusan biaya atau pungutan-pungutan yang dapat menekan ekonomi biaya tinggi, dan (3) pentingnya menerapkan kebijakan yang pro pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani secara konsisten dan berkelanjutan.
28. Adanya variasi tingkat dan faktor yang mempengaruhi diversifikasi usaha rumah tangga antar wilayah (desa-kota), antar kelompok pendapatan maupun antar agroekosistem menuntut pentingnya penerapan kebijakan pengembangan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha yang bersifat lokal spesifik. Untuk wilayah pedesaan bisa diterapkan pengembangan pola family farming yang bersifat lokal spesifik dengan mengembangkan komoditas unggulan daerah setempat yang potensial dan memiliki prospek pasar baik. Sedangkan untuk daerah perkotaan dapat dikembangkan usaha-usaha di sektor informal. Bagi kelompok pendapatan rendah dan sedang, fasilitasi dan penyediaan serta kemudahan rumah tangga pertanian untuk akses terhadap sumber daya pertanian (sarana produksi, modal, dan teknologi) merupakan pilihan kebijakan yang patut dikedepankan. Sementara itu, bagi kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi, kebijakan yang mampu mendorong kenyamanan dan keamanan dalam

- berusaha berupa dukungan untuk terciptanya keamanan lingkungan yang mendukung investor melakukan investasi di pedesaan khususnya merupakan pilihan tepat.
29. Dari kasus empat agroekosistem yang dianalisis, kebijakan pengembangan diversifikasi usaha rumah tangga disarankan tidak bersifat generik namun disesuaikan dengan agroekosistem setempat. Untuk rumah tangga pertanian di agroekosistem lahan sawah, keragaan diversifikasi horizontal di sektor pertanian antara desa contoh di Jawa lebih tinggi dari desa contoh di Luar Jawa. Rataan luas penguasaan lahan dan ketersediaan tenaga kerja keluarga merupakan penyebab adanya perbedaan tersebut. Dalam hal demikian kebijakan pengembangan diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga di agroekosistem sawah di luar Jawa perlu menekankan upaya pengembangan usaha diversifikasi vertikal dalam bentuk pengembangan produk olahan berbahan baku pangan (beras). Sedangkan pengembangan diversifikasi di wilayah agroekosistem sawah di Jawa dapat diarahkan ke fasilitasi pengembangan diversifikasi horizontal pada komoditas yang bernilai ekonomi tinggi serta pengembangan usaha nonpertanian (agroindustri) yang mampu menyerap tenaga kerja di pedesaan.
  30. Pengembangan diversifikasi usaha di agroekosistem lahan kering berbasis tanaman pangan dan hortikultura dapat mengacu pada pengembangan agroekosistem lahan sawah (kasus desa di Jawa). Hal ini didasarkan pada karakteristik diversifikasi usaha rumah tangga di kedua agroekosistem yang serupa. Oleh karena itu fasilitasi pengembangan diversifikasi horizontal pada komoditas yang bernilai tinggi serta pengembangan usaha non-pertanian (agroindustri) yang mampu menyerap tenaga kerja di pedesaan merupakan kebijakan yang dapat dipilih.
  31. Untuk wilayah dengan agroekosistem lahan kering berbasis komoditas perkebunan (kakao), rekomendasi kebijakan peningkatan dan stabilitas pendapatan rumah tangga bukan pada diversifikasi usaha rumah tangga namun perlu diarahkan pada upaya peningkatan kualitas hasil dan fasilitasi keterjaminan pasar produk. Untuk ini kebijakan pengembangan kemitraan antara petani dan usaha pengolahan hasil kakao dengan prinsip saling membutuhkan, saling percaya dan saling menguntungkan merupakan strategi yang perlu ditempuh.
  32. Untuk wilayah dengan agroekosistem lahan kering berbasis komoditas sapi perah, mengingat relatif tingginya intensitas penggunaan tenaga kerja keluarga dalam usaha ternak sapi perah dan relatif cukup memadainya tingkat pendapatan peternak, maka kebijakan diversifikasi usaha rumah tangga perlu diarahkan pada upaya menciptakan dan memfasilitasi terbukanya kesempatan kerja nonpertanian bagi rumah tangga di wilayah tersebut yang masih memiliki surplus tenaga kerja.

33. Terkait dengan aspek ketahanan pangan, mengingat masalah defisit energi pada rumah tangga masih cenderung menguat, maka promosi makan dengan menu seimbang sesuai PUGS (Pedoman Umum Gizi Seimbang) juga perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan dengan pendekatan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi). Disamping itu, guna lebih menjamin stabilitas dan sustainabilitas ekonomi rumah tangga agar tidak masuk perangkap kemiskinan maka program-program yang berkaitan dengan pengaturan ukuran keluarga (keluarga berencana) perlu digiatkan kembali secara simultan dengan upaya perbaikan dan pembangunan sektor ekonomi. Dalam era desentrali-sasi, peran pemda dalam menginisiasi program tersebut menjadi sangat kritikal.